



K a b .
T a s i k m a l a y a

▶ RENCANA KERJA BPKPD T.A 2026



**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504

Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.9.2/KEP.27/BPKPD/2025

LAMPIRAN :

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja BPKPD Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah

- Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 33);
23. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
24. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025– 2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 8 APRIL 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19581008 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.9.2/KEP.27/BPKPD/2025
TANGGAL : 8 APRIL 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
- : Kepala Bidang Anggaran
- : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- : Kepala Bidang Perbendaharaan
- : Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
- : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- : Perencana Ahli Pertama
- : Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 000.9.2/KEP.53/BPKPD/2025

LAMPIRAN :

TENTANG

RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 33);
23. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
24. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025– 2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Dis. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

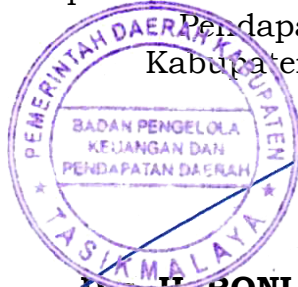
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja PD mengacu pada Ranwal RPJMD Tahun 2025 – 2029, Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi. Renja BPKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun yang digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Daerah. dengan sistematika: Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Penutup. Dalam Renja BPKPD Tahun 2026, BPKPD direncanakan melakukan **“Optimalisasi Pelayanan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara Digital”** didukung oleh 4 Program 13 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp757.397.753.915,00.

Diharapkan dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan arah pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan satu tahun kedepan sehingga menghasilkan perencanaan yang baik dan bertanggungjawab dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan kinerja

Singaparna, 25 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



DIS. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

1 BAB I..... 1-1

PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 Latar Belakang..... 1-1

1.2 Landasan Hukum..... 1-2

1.3 Maksud dan Tujuan 1-6

1.4 Sistematika Penulisan..... 1-7

2 BAB II 2-2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2-2

TAHUN LALU 2-2

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2-2

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2-19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....2-28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD2-32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat2-47

3 BAB III..... 3-1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 3-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-6

4 BAB IV 4-1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

5 BAB V PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW I Tahun 2025.....	2-4
Tabel Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	2-25
Tabel Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	2-33
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 Dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya	2 -47
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran BPKPD.....	3-9
Tabel 3.2 Tujuan BPKPD.....	3-9
Tabel 3.3 Sasaran BPKPD.....	3-9
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama BPKPD.....	3-10
Tabel 4.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan.....	4-3
Tabel 4.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan.....	4-7
Tabel T-C 33 Rumusan Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan BPKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	4-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Serta diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun, serta sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja Tahun 2026. Renja BPKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2025-2029, isu strategis, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Selanjutnya dalam penyusunan Renja BPKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra BPKPD dan

RPD tahun yang berkenaan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan. Oleh sebab itu penyusunan Renja BPKPD Tahun Anggaran 2026 diharapkan lebih konkrit dan terukur serta lebih memfokuskan perencanaan kegiatan sesuai dengan perkembangan dan mencapai tujuan BPKPD sebagaimana akan ditetapkan dalam target kinerja.

Renja 2026 juga disusun dengan memperhatikan berbagai isu strategis, kondisi aktual, evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya, serta dinamika kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional yang relevan. Oleh karena itu, dokumen Renja ini tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan akuntabilitas kinerja dan efektivitas belanja daerah. Untuk menyelesaikan isu tersebut, perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam setiap penyelenggaraan program kegiatan. Inovasi yang rencananya akan dilakukan oleh BPKPD pada Tahun Anggaran 2026 yaitu meningkatkan potensi pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, melakukan optimalisasi terhadap pelayanan pajak daerah berbasis digital serta melakukan peningkatan kapasitas SDM BPKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 33);
23. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
24. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian kinerja BPKPD yang didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun, Renja digunakan sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja BPKPD Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2025-2029 kedalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun;
2. Sebagai pedoman bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam perencanaan anggaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026;
4. Memecahkan masalah yang dihadapi serta menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPD;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu merupakan salah satu upaya untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi, melebihi atau tidak memenuhi, serta mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja selanjutnya mengambil kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 737.703.200.417,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp22.836.075.321,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp698.321.517.548,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp16.540.969.025,00. Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 98,66% atau sebesar Rp727.206.598.943,00 dengan persentase *output* sebesar 101,25%. Terdapat 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 1 sub kegiatan yang tercapai 175% yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dimana ditargetkan 4 dokumen dan terealisasi 7 dokumen.

Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran berdasarkan pagu setelah efisiensi sebesar Rp747.795.627.710,00 dengan rincian belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar

Rp699.145.117.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp16.523.597.560,00. Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan triwulan I mencapai 9,26% atau sebesar Rp69.232.562.268,00 dengan persentase output kegiatan sebesar 16,97%. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang telah selesai pada triwulan I yaitu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD. Realisasi anggaran pada triwulan I masih terbilang rendah karena pelaksanaan kegiatan tersebut menunggu kebijakan pengalokasian anggaran/efisiensi anggaran yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW I Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2				KEUANGAN			5.157.411.804.645		2.336.708.321 .181		737.074.467.79 4		727.206.598.9 43	98,66		747.795.62 7.710	3.133.147.482.3 92	60,75
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	929.027.583.833	80 Poin	211.392.857.6 74	82 Poin	23.105.075.321	82 Poin	21.623.699.80 1	93,59	83	32.296.960. 247	236.917.713.41 5	25,50
						Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	46.129.492.528	86,76	14.867.308.62 1	86,80 Poin	7.137.022.925	86,81 Poin	6.721.487.996	94,18	87	5.576.567.1 90	22.802.523.429	49,43
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388 Dokumen	1.120.729.900	115 Dokumen	328.838.250	101 Dokumen	269.000.000	101 Dokumen	265.510.178	98,70	106 dokumen	170.047.10 0	644.526.428	57,51
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	91 Dokumen	799.347.400	50 Dokumen	240.745.400	27 dokumen	143.000.000	27 dokumen	140.649.178	98,36	33 dokumen	123.240.000, 00	413.793.078	51,77

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158 Laporan	223.877.500	44 Laporan	41.939.750	-	-						41.939.750	18,73	
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	139 Laporan	97.505.000	117 Laporan	46.153.100	74 dokumen	126.000.000	74 dokumen	124.861.000	99,10	73 dokumen	46.807.100,0 0	188.793.600	193,62	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	927.906.853.933	100%	211.064.019.4 24	100%	22.836.075.321	100%	21.358.189.62 3	93,53	100%	32.126.913. 147	236.273.186.98 7	25,46	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/ bulan	927.906.853.933	94 orang/ bulan	211.064.019.4 24	95 Orang	22.836.075.321	95 Orang	21.358.189.62 3	93,53	97 orang	32.126.913.1 47,00	236.273.186.987	25,46	
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	2.772.879.100	100%	505.026.341	100%	447.340.000	100%	439.326.156	98,21	100%	149.290.00 0	953.682.497	34,39	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.380.000			2 Paket	84.190.000	2 Paket	81.940.000	97,33	2 Paket	61.690.000,0 0	81.940.000	48,66	
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	169.292.000										0	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	882 Orang	2.435.207.100	285 Orang	505.026.341	145 Orang	363.150.000	145 Orang	357.386.156	98,41	151 orang	87.600.000,00	871.742.497	35,80
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	13.355.569.301	100%	5.311.816.838	100%	2.331.716.225	100%	2.231.468.727	95,70	100%	1.891.862.707	8.042.592.383	60,22
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	282.050.000	3 Paket	124.887.575	1 Paket	49.999.500	1 Paket	49.418.500	98,84	1 Paket	40.750.000,00	183.248.075	64,97
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	3.463.250.309	9 Paket	1.442.950.404	3 Paket	640.084.800	3 Paket	617.700.350	96,50	3 Paket	506.466.740,00	2.060.650.754	59,50
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	420.253.882	9 Paket	221.219.813	1 Paket	59.997.500	1 Paket	58.698.800	97,84	1 Paket	60.915.967,00	292.639.654	69,63
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	1.182.300.000	9 Paket	360.720.000	1 Paket	115.200.000	1 Paket	101.580.000	88,18	1 Paket	105.000.000,00	481.200.000	40,70
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	3.317.076.150	5 Paket	1.567.231.024	1 Paket	760.169.400	1 Paket	752.290.400	98,96	1 Paket	389.323.000,00	2.666.909.224	80,40
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	712.000.000	12 Dokumen	106.580.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	53.750.000	76,79	4 Dokumen	56.000.000,00	170.290.000	23,92

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5 Paket	259.797.760	2 Paket	79.021.900	-	-	-					79.021.900	30,42	
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	574.080.000	28 Laporan	385.200.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	100,00	4 Laporan	180.000.000, 00	610.200.000	106,29	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	2.498.395.200	28 Laporan	949.229.132	4 Laporan	388.165.025	4 Laporan	351.850.677	90,64	4 Laporan	505.000.000, 00	1.343.568.786	53,78	
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	446.366.000	1 Dokumen	24.776.990	1 Dokumen	68.100.000	1 Dokumen	66.180.000	97,18	1 Dokumen	48.407.000,0 0	104.863.990	23,49	
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-		-					50.000.000	25,00	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	10.174.531.937	100%	641.468.500	-	914.731.400		898.081.900	98,18	100%	424.801.20 0	1.539.550.400	15,13	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 Unit	4.005.950.000	-	-	-	-						0	0,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	21 Unit	1.131.414.357	4 Unit	197.937.800	1 Unit	81.690.000	1 Unit	75.550.000	92,48			273.487.800	24,17
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	120 Unit	4.631.456.780	30 Unit	403.960.700	43 Unit	833.041.400	43 Unit	822.531.900	98,74	13 Unit	424.801.200,00	1.226.492.600	26,48
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	405.710.800	1 Unit	39.570.000	-	-						39.570.000	9,75
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.906.920.030	100%	4.705.701.490	100%	1.690.670.500	100%	1.525.825.131	90,25	100%	1.838.950.000	6.711.710.265	67,75
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	5.660.255.120	36 Laporan	2.725.056.006	12 Laporan	993.270.500	12 Laporan	850.993.117	85,68	12 Laporan	1.099.750.000,00	3.815.029.763	67,40
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	349.742.000	4 Laporan	181.000.000	1 Laporan	63.000.000	1 Laporan	62.000.000	98,41	1 Laporan	88.000.000,00	301.000.000	86,06
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	3.896.922.910	36 Laporan	1.799.645.484	12 Laporan	634.400.000	12 Laporan	612.832.014	96,60	12 Laporan	651.200.000,00	2.595.680.502	66,61

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.919.592.160	100%	3.703.295.452	100%	1.752.564.800	100%	1.626.786.082	92,82	100%	1.271.663.283	5.554.987.884	56,00
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	3.876.624.700	70 Unit	1.826.795.297	70 Unit	902.230.000	70 Unit	784.455.822	86,95	70 Unit	799.990.000,00	2.723.872.469	70,26
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.665 Unit	2.423.721.460	809 Unit	1.208.615.230	253 unit	460.440.000	253 unit	456.965.260	99,25	143 Unit	282.748.483,00	1.777.865.490	73,35
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3.619.246.000	3 Unit	667.884.925	3 Unit	389.894.800	3 Unit	385.365.000	98,84	3 Unit	188.924.800,00	1.053.249.925	29,10
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4.126.422.088.024	100%	2.095.792.662.682	100%	701.350.456.448	101,14%	693.603.902.309	98,90	100%	702.583.313.003	2.852.873.650.161	69,14
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	10.150.083.938	100%	4.894.215.901	100%	2.415.072.000	106,82%	2.387.838.983	98,87	100%	2.460.246.500	7.694.285.254	75,81
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	5 dokumen	727.478.000	3 Dokumen	245.910.235	1 Dokumen	62.450.000	1 Dokumen	62.087.560	99,42	1 Dokumen	79.684.000,00	307.997.795	42,34

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11 = (10/4))
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	5 Dokumen	707.500.000	3 Dokumen	229.465.585	1 Dokumen	62.450.000	1 Dokumen	61.581.014	98,61	1 Dokumen	79.684.000,0 0	291.046.599	41,14
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	495.978.000	180 Dokumen	221.220.926	59 Dokumen	60.042.000	59 Dokumen	59.738.550	99,49	59 Dokumen	73.568.000,0 0	280.959.476	56,65
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan VerifikasiPerubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	500.978.000	180 Dokumen	221.936.975	59 Dokumen	57.450.000	59 Dokumen	54.559.975	94,97	59 Dokumen	73.568.000,0 0	276.496.950	55,19
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	483.700.000	180 Dokumen	187.020.580	59 Dokumen	72.500.000	59 Dokumen	70.853.988	97,73	59 Dokumen	67.003.500,0 0	318.407.418	65,83
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	421.910.000	180 Dokumen	206.633.886	59 Dokumen	66.440.000	59 Dokumen	66.198.531	99,64	59 Dokumen	69.893.500,0 0	272.832.417	64,67
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.516.806.500	6 Dokumen	598.521.631	2 Dokumen	234.200.000	2 Dokumen	231.983.618	99,05	2 Dokumen	149.783.000, 00	830.505.249	54,75
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.659.425.000	6 Dokumen	650.480.784	2 Dokumen	228.290.000	2 Dokumen	227.161.523	99,51	2 Dokumen	155.683.000, 00	877.642.307	52,89
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8 Dokumen	411.000.000	13 Dokumen	204.851.351	4 Dokumen	613.980.000	7 Dokumen	604.863.320	98,52	5 Dokumen	717.283.000, 00	976.301.431	237,54

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024					Tingkat Realisasi (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	5 Dokumen	2.037.132.500	3 Dokumen	1.364.492.921	1 Dokumen	607.394.000	1 Dokumen	602.813.248	99,25	1 Dokumen	619.221.000,00	2.061.421.869	101,19
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.192 Orang	1.188.175.938	1.232 Orang	763.681.027	318 Orang	349.876.000	318 Orang	345.997.656	98,89	398 Orang	374.875.500,00	1.200.673.743	101,05
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	3.317.482.600	100	950.102.478	100	492.461.000	100	475.257.886	96,51	100%	404.198.000	1.531.051.364	46,15
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	177 Dokumen	465.499.500	59 Dokumen	92.725.000	-	-						92.725.000	19,92
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	708 Dokumen	314.999.500	-	0	236 Dokumen	52.050.000	236 Dokumen	51.007.500	98,00	236 Dokumen	49.970.000,00	61.535.500	19,54
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	865.041.375	36 Dokumen	380.224.243	12 Dokumen	181.200.000	12 Dokumen	173.493.861	95,75	12 Dokumen	195.752.000,00	602.252.104	69,62

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)						(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)	(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dokumen	314.999.500	-	0	2 dokumen	119.211.000	2 dokumen	110.810.550	92,95	2 Dokumen	26.266.000,00	110.810.550	35,18	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	891.942.975	36 Dokumen	378.826.335	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	139.945.975	99,96	12 Dokumen	132.210.000,00	565.401.310	63,39	
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	98.326.900	-	-					98.326.900	65,55		
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota	195 Dokumen	314.999.750	-	-	-	-					0	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024					Tingkat Realisasi (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	6.416.479.490	100%	1.770.444.993	100%	745.500.000	100%	650.619.356	87,27	100%	573.751.500	2.505.598.349	39,05
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64 Dokumen	938.500.000	32 Dokumen	228.250.367	16 Dokumen	143.930.000	16 Dokumen	123.007.865	85,46	14 Dokumen	89.850.000,00	359.258.232	38,28
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85 Laporan	880.038.000	51 Laporan	364.604.192	15 Laporan	109.900.000	15 Laporan	79.033.953	71,91	17 Laporan	86.812.000,00	459.638.145	52,23
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	4 Dokumen	655.000.000	2 Dokumen	94.521.872	3 Laporan	132.000.000	3 Laporan	126.022.899	95,47	3 Laporan	161.300.000,00	281.078.771	42,91

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.353.815.000	6 Dokumen	581.683.725	2 Dokumen	152.150.000	2 Dokumen	130.009.654	85,45	2 Dokumen	113.266.500,00	711.693.379	52,57
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16 Dokumen	1.011.077.490	2 Dokumen	243.627.226	-	-						243.627.226	24,10
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	4 Dokumen	630.000.000	2 Dokumen	69.687.688	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	55.433.526	83,30	1 Dokumen	24.538.000,00	125.121.214	19,86
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	310 orang	520.049.000	239 orang	141.094.168	123 Orang	90.000.000	123 Orang	87.004.497	96,67	128 Orang	47.985.000,00	228.098.665	43,86
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	160 Lembaga	428.000.000	40 Lembaga	46.975.755	40 Lembaga	50.970.000	40 Lembaga	50.106.962	98,31	41 Lembaga	50.000.000,00	97.082.717	22,68

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024					Tingkat Realisasi (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4.106.538.041.996	100%	2.088.177.899 .310	100%	697.697.423.44 8	100%	690.090.186.0 84	98,91	100%	699.145.11 7.003	2.841.142.715.1 94	69,19
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60 Laporan	3.815.124.788.867	36 Laporan	1.985.037.534. 300	12 Laporan	652.316.034.000	12 Laporan	652.151.034.0 00	99,97	12 Laporan	651.393.740. 000,00	2.697.985.468.30 0	70,72
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5 Laporan	233.897.874.625	3 Laporan	76.804.582.01 0	1 Laporan	30.951.050.997	1 Laporan	26.020.100.68 4	84,07	1 Laporan	28.776.605.0 00,00	104.902.412.494	44,85
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	57.515.378.504	3 Laporan	26.335.783.00 0	1 Laporan	14.430.338.451	1 Laporan	11.919.051.40 0	82,60	1 Laporan	18.974.772.0 03,00	38.254.834.400	66,51
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	8.725.325.000	84,68%	2.125.373.912	86%	956.852.100	0,83	955.508.449	99,86	83,49%	1.616.293.5 00	3.178.941.861	36,43
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	8.725.325.000	100%	2.125.373.912	100%	956.852.100	100%	955.508.449	99,86	83,49%	1.616.293.5 00	3.178.941.861	36,43
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8 Dokumen	1.300.295.705	6 Dokumen	370.478.080	2 Dokumen	131.267.000	2 Dokumen	130.673.408	99,55	2 Dokumen	100.915.000, 00	502.361.488	38,63
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	310.000.000	10 Dokumen	77.915.785	2 Dokumen	31.735.100	2 Dokumen	31.735.100	100,00	2 Dokumen	19.088.000,0 0	109.650.885	35,37

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4)
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.000			-	-						0	0,00
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	21 Laporan	1.975.088.225	17 Laporan	1.060.579.425	2 Laporan	539.850.000	2 Laporan	539.204.941	99,88	2 Laporan	1.111.747.50 0,00	1.625.364.366	82,29
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;	6 Dokumen	1.500.000.000	-	-	-	-						0	0,00
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60 laporan	1.068.000.000	36 laporan	469.970.932	12 laporan	254.000.000	12 laporan	253.895.000	99,96	12 Laporan	384.543.000, 00	795.135.432	74,45
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mngikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	329 Orang	1.971.941.070	60 Orang	146.429.690	-	-						146.429.690	7,43
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	47.107.315.260	100%	12.530.118.29 2	100%	4.525.061.000	100%	4.302.000.388	95,07	100%	5.722.493.7 70	17.374.653.526	36,88
5	2	4	2.01		Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	47.107.315.260	100%	12.530.118.29 2	100%	4.525.061.000	100%	4.302.000.388	95,07	100%	5.722.493.7 70	17.374.653.526	36,88
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8 Laporan	860.000.000	-	0	1 dokumen	284.671.000	1 dokumen	281.803.271	98,99	1 dokumen	154.549.500, 00	314.323.271,00	36,55

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.800.000.000	2 Dokumen	261.462.266	2 dokumen	584.655.000	2 dokumen	528.487.971	90,39	2 dokumen	173.443.000,00	836.705.237	46,48
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	16 Laporan	1.860.000.000	8 Laporan	225.319.277	4 Laporan	106.495.000	4 Laporan	105.410.996	98,98	4 Laporan	92.109.500,00	344.624.773	18,53
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	34 Unit	6.806.923.200	19 Unit	4.035.289.408	29 Unit	1.931.000.000	29 Unit	1.901.299.455	98,46	29 Unit	2.057.650.250,00	6.124.755.189	89,98
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	12 Laporan	3.112.900.000	9 Laporan	304.103.413	4 Laporan	75.580.000	4 Laporan	74.809.460	98,98	2 Laporan	838.995.500,00	380.952.873	12,24
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.285.969 OP	16.051.415.000	300.958 OP	2.797.159.457	-	-	-	-	-	376.400 Objek Pajak	222.480.000,00	2.797.159.457	17,43
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	3.933.806.240	14 Layanan	1.919.368.712	1 Layanan	512.550.000	1 Layanan	511.671.210	99,83	1 Layanan	1.090.149.320,00	2.615.359.622	66,48

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)	(11 = (10/4))
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 Dokumen	500.000.000	12 Dokumen	38.185.000	12 Dokumen	43.256.000	12 Dokumen	43.224.000	99,93	12 Dokumen	53.752.700,00	85.683.200	17,14
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	60 Dokumen	5.803.351.750	36 Dokumen	2.033.748.405	12 Dokumen	830.970.000	12 Dokumen	705.888.325	84,95	12 Dokumen	762.002.000,00	2.804.991.850	48,33
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	20 Dokumen	4.578.919.070	12 Dokumen	915.482.354	4 Dokumen	155.884.000	4 Dokumen	149.405.700	95,84	4 Dokumen	277.362.000,00	1.070.098.054	23,37
5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	300.000.000									0	0,00	
Total							100	5.157.411.804.645	101,63	2.336.708.321.181	100	737.074.467.794	101,25	727.206.598.943	98,66	100	747.795.627.710	3.133.147.482.392	60,75

Sumber : BPKPD, diolah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran:
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran:
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran:
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran:
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, dilakukan dengan menggunakan sasaran kinerja dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, serta memperhatikan standar nasional dan standar provinsi. Hasil analisis terhadap capaian kinerja BPKPD tahun 2024 serta target tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut.

Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Realiasi tahun 2024 dari 4 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 111,85% dan Persentase pertumbuhan pajak daerah dengan capaian kinerja 120,27%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan untuk indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ditargetkan tercapai 86% namun terealisasi 82,95%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 pensertipikatan tanah/bangunan milik daerah berfokus pada pensertipikatan ruas jalan dan terdapat perubahan data mengenai tanah/bangunan milik pemerintah daerah dari hasil temuan BPK RI, hibah dan belanja modal serta terdapat 346 unit kendaraan yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sehingga mempengaruhi kepada persentase perhitungan BMD yang telah memiliki bukti kepemilikan.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2024 tercapai sebesar 78,25 kategori “A” predikat Sangat Baik. Penilaian RB pada tahun 2024 menggunakan sistem melalui link <https://surabi.jabarprov.go.id>. Penilaian tersebut dilakukan

dengan *self assesment* terlebih dahulu dengan nilai 86,61 yang terdiri dari RB General 54,78 dan RB Tematik 32,03. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim evaluator Internal Kabupaten Tasikmalaya dan tim evaluator Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil akhir, BPKPD memperoleh nilai sebesar 87,52 dengan rincian RB General 55, 62 dan RB Tematik 31,89. Hasil akhir tersebut telah melebihi target dan penilaian *self assesment* yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2024 RB BPKPD terealisasi dengan nilai 87,52 kategori “A” predikat Sangat Baik sehingga mencapai kinerja sebesar 111,85% dari target 78,25. Nilai tersebut menjadikan BPKPD sebagai peringkat ke-3 (tiga) yang memperoleh nilai RB tertinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku terealisasi 100%. APBD tahun 2025 telah disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. APBD tahun 2025 telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan telah ditetapkan Perda dan Perbup APBD tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2024, maka penetapan tersebut telah tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyusunan, mengkoordinasikan serta menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu. Pada tahun 2025 telah melakukan penyusunan dan pelaporan

keuangan dengan rincian 11 laporan bulanan 3 laporan triwulanan, 1 laporan semesteran dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2024, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 84 dokumen terdiri dari dokumen belanja bantuan sosial (3 dokumen), dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal (3 dokumen), dokumen belanja tidak terduga (3 dokumen), dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan (3 dokumen), dokumen belanja hibah (3 dokumen), dokumen belanja transfer (3 dokumen), dan dokumen pembiayaan (3 dokumen), dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100% sesuai dengan target indikator pada tahun 2024 yaitu 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Untuk capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.911 unit dan yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2.527 unit sedangkan untuk bidang tanah sebanyak 742 bidang dengan yang telah bersertifikat sebanyak 503 bidang. Berdasarkan data tersebut maka capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan pada tahun 2024 yaitu 82,94% dengan capaian kinerja sebesar 96,45% dari target 86%. Capaian 2024 tersebut menunjukkan capaian yang lebih rendah dari capaian tahun 2023 dikarenakan terdapat revisi data jumlah bidang tanah dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Hal tersebut dikarenakan adanya belanja modal berupa 2 unit kendaraan roda empat dan 15 unit roda dua serta adanya hibah 346 unit kendaraan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Target penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 110.710.124.764,00, berdasarkan LRA *audited* realisasi yang diterima dari pajak daerah tersebut sebesar 94,06% atau Rp104.138.533.398,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 jenis pajak tidak melampaui target yang telah ditetapkan, diantaranya Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya, realisasi Tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan LRA *audited*, pajak daerah tersebut tumbuh sebesar 6,16% dari realisasi pajak daerah tahun 2023 yang mencapai Rp98.097.622.047,00. Perhitungan pertumbuhan pajak daerah tersebut dihasilkan dari selisih penerimaan pajak daerah tahun 2024 dengan tahun 2023, lalu dibandingkan dengan tahun 2023

$$\left(\frac{104.138.533.398 - 98.097.622.047}{98.097.622.047} \times 100\% \right) = 6,16\%.$$

Capaian pertumbuhan pajak tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dimana target persentase pertumbuhan pajak daerah untuk tahun 2024 yaitu 5,18% dan tersealisasi 6,16% sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator tersebut yaitu

118,92%. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,019	79	84,50	85	84,007	79	84,50	85	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,25	87,6	87,75	87,52	78,25	87,6	87,75	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	83	86	83,49	84,04	82,95	86	83,49	84,04	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	5,18	51,16	5,05	6,16	5,18	51,16	5,05	IKU PD
6	Persentase PAD	%	10,8	10,91	11,01	11,01	10,064	10,91	11,01	11,01	IKD

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7	Opini BPK	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	1,014027	2,19	1,94	1,69	IKD
10	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	1,014027	2,19	1,94	1,69	IKD
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,59	4,49	4,39	4,29	7,281	4,49	4,39	4,29	IKD
13	Rasio PAD (Terhadap PDRB)	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,779	1,32	1,41	1,51	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	61	62	63	63,66	61	62	63	IKD
15	Opini Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,54	13,44	13,34	13,24	2,716	13,44	13,34	13,24	IKD

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,91	7,81	7,71	7,61	5,614	7,81	7,71	7,61	IKD
18	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD
19	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,67	1,52	1,38	1,26	1,042	1,52	1,38	1,26	IKD
20	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,84	1,32	1,41	1,51	IKD
21	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb	%	0,25	0,27	0,28	0,3	0,24	0,27	0,28	0,3	IKD

Sumber : BPKPD, diolah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang berbasis Digital;
2. Belum optimalnya penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Masih lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas untuk wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar;
4. Masih terdapat SDM penyusun laporan keuangan SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
5. Masih terdapat tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah;
6. Dinamisnya kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

7. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan BPKPD selalu melakukan perbaikan mutu produk layanan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

BPKPD selaku perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang bertindak dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan, memiliki isu penting yang harus segera diselesaikan. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian pada BPKPD diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Implentasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Opsen);
3. Percepatan implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah;
4. Penyelesaian pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peralihan penggunaan sistem pengelola Barang Milik Daerah.

Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, dalam rangka menindaklanjuti isu strategis yang dihadapi serta untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pajak daerah melalui *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*, yaitu dengan cara :
 - a. Melakukan kegiatan pemutahiran data NJOP PBB P2 sesuai dengan harga pasar wajar (ZNT);
 - b. Pendataan/pemuktahiran objek dan subjek pajak daerah;
 - c. Pemeliharaan database wajib pajak;
 - d. Sinkronisasi Program/kegiatan bersama samsat dari opsen PKB dan BBNKB;
 - e. Meningkatkan pelayanan untuk opsen PKB dan BBNKB.
2. Melakukan pemanfaatan aset daerah yang *idle* bekerjasama dengan KPKNL
 - a. Kajian terkait aset daerah yang akan dimanfaatkan telah dilakukan oleh Bappelitbangda dengan melibatkan akademisi, namun kajian tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena masih bersifat umum/teoritis. Dimana seharusnya kajian tersebut memakai kajian dengan penilaian HBU (*High Best Use*) sehingga dapat mengetahui dengan jelas nilai aset tertinggi. Analisis HBU meliputi empat hal pokok yaitu, analisis kelayakan secara fisik (*physically feasible*), analisis kelayakan secara peraturan (*legally permissible*), analisis kelayakan secara keuangan (*financially feasible*), dan analisis produktivitas yang maksimal (*maximally productive*). Lazimnya, analisis HBU dalam konteks optimalisasi aset dilaksanakan lebih detail dibandingkan dalam konteks penilaian aset.

- b. Melakukan kerjasama dengan DPMPSTSP untuk mencari investor yang akan melakukan pemanfaatan aset
3. Melakukan optimalisasi terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis digital, dengan rutin melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi pajak daerah yang digunakan. Melakukan pengembangan Aplikasi Elektronik Retribusi Kabupaten Tasikmalaya (ERIKA) yang merupakan sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang berfungsi membantu proses penghitungan, pencatatan identitas wajib pajak dan objek pajak, pembayaran dan pembuatan laporan penerimaan/realisasi Retribusi. Serta melakukan pengadaan mesin SAMSAT DIGITAL yang merupakan perangkat pembayaran pajak tahunan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa keberadaan petugas dengan cara tapping E-KTP dan pemindaian sidik jari kemudian dapat langsung mengetahui status pajak kendaraan yang bersangkutan.
4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM BPKPD dengan mengikutsertakan pegawai BPKPD dalam kegiatan diklat/ bimbingan teknik/ pelatihan/ kursus yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh pegawai tersebut serta melakukan *Capacity Building* dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku pegawai sehingga lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya;
5. Melakukan percepatan penyelesaian pensertipikatan bidang tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan ATR/BPN, Dinas PUPRLTH serta *stakeholder* lainnya;
6. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Bahwa dalam regulasi tersebut menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses pengelolaan aset daerah melalui penerapan

aplikasi E-BMD (Electronic Barang Milik Daerah), Tujuan dari pengelolaan aset daerah adalah untuk memastikan laporan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama kepada seluruh masyarakat, serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2026 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, BPKPD harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan atau belum sesuai. Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2026 direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp757.397.753.915,00. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel T-C 31 :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah	- 84 Poin - 87,25	39.836.548.162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	- 84 Poin - 87,25	39.836.548.162	
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 Dokumen	203.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 Dokumen	203.000.000	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	123.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	123.000.000	
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73 Laporan	80.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73 Laporan	80.000.000	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	32.126.913.147	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	32.126.913.147	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	32.126.913.147,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/bulan	32.126.913.147,00	
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	482.419.485	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	482.419.485	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.419.485	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.419.485	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	395.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	395.000.000	
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.488.801.047	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.488.801.047	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.750.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.750.000,00	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	575.043.350	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	575.043.350	
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.915.967	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.915.967	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	550.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	550.000.000	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	62.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	62.000.000	
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	180.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	180.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	737.532.730	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	737.532.730	
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	82.559.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	82.559.000	
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	424.801.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	424.801.200	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	424.801.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	424.801.200	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.838.950.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.838.950.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.099.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.099.750.000	
5	2	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.000.000	
5	2	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	651.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	651.200.000	
5	2	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.271.663.283	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.271.663.283	
5	2	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	799.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	799.990.000	
5	2	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	282.748.483	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	282.748.483	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	1.188.924.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	1.188.924.800	
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	705.318.092.003	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	705.318.092.003	
5	2	2	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.662.640.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.662.640.000	
5	2	2	2.01	1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	
5	2	2	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	
5	2	2	2.01	3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	
5	2	2	2.01	4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Kabupaten Tasikmalaya					Kabupaten Tasikmalaya				
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	72.500.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	72.500.000		
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.000.000		
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	169.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	169.800.000		
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	169.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	169.800.000		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	728.770.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	728.770.000		
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	647.394.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	647.394.000,00		

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	468.376.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	468.376.000	
5	2	2	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	718.500.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	718.500.000	
5	2	2	2.02	1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	60.500.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	60.500.000,00	
5	2	2	2.02	3		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	62.700.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	62.700.000	
5	2	2	2.02	5		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	233.200.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	233.200.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	117.700.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	117.700.000		
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	244.400.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	244.400.000		
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.053.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.053.000.000		
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	180.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	180.000.000		
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	128.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	128.000.000		

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	194.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	194.000.000	
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	152.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	152.000.000	
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	79.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	79.000.000	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	60.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	60.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.03	12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	60.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	60.000.000	
5	2	2	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	700.883.952.003	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	700.883.952.003	
5	2	2	2.04	8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	651.893.740.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	651.893.740.000	
5	2	2	2.04	9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.015.440.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.015.440.000	
5	2	2	2.04	10		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.974.772.003	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.974.772.003	
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	3.447.800.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	3.447.800.000	
5	2	3	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	3.447.800.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	3.447.800.000	
5	2	3	2.01	1		Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	Penyusunan Standar Harga	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	
	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	169.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	169.000.000	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.250.100.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.250.100.000	
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.418.700.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.418.700.000	
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	410.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	410.000.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	8.795.313.750	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	8.795.313.750	
5	2	4	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	8.795.313.750	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	8.795.313.750	
5	2	4	2.01	1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
5	2	4	2.01	2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	297.359.500	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	297.359.500	
5	2	4	2.01	3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	259.608.750	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	259.608.750	
5	2	4	2.01	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24 Unit	3.463.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24 Unit	3.463.000.000	
5	2	4	2.01	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1.399.150.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	1.399.150.000	

Kode						Rancangan Awal RKPD					Analisis Hasil Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	4	2.01	9		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1.549.083.500	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1.549.083.500	
5	2	4	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	150.000.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	150.000.000	
5	2	4	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.000.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.000.000.000	
5	2	4	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	247.112.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	247.112.000	
5	2	4	2.01	15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	330.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	330.000.000	
Jumlah										757.397.753.915					757.397.753.915	

Sumber : BPKPD, diolah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah BPKPD. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari Tahun 2025 melalui media daring dan luring. Namun berdasarkan kegiatan tersebut tidak terdapat usulan dari seluruh *stakeholder* yang hadir terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD Tahun 2026.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
Dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Berdasarkan tupoksi tersebut maka BPKPD mendukung prioritas 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab, dengan fokus pada pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Upaya ini membutuhkan kebijakan yang kuat dan konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi generasi penerus dari berbagai ancaman. Reformasi ini diharapkan menciptakan situasi kondusif bagi pembangunan di berbagai bidang. Dalam pembangunan jangka menengah

nasional 2025–2029, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memberantas tindak kejahatan yang merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa.

Arah Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka pencapaian prioritas tersebut diantaranya :

1. Reformasi politik dan tata kelola pemilu;
2. Reformasi hukum;
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang;
4. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum;
5. Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal;
6. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
7. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pemerintah digital;
9. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan;
10. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah;
11. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara;
12. Optimalisasi pendapatan negara;
13. Optimalisasi belanja negara;
14. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan;
15. Pengendalian inflasi;
16. Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.

Visi Provinsi Jawa Barat “JABAR ISTIMEWA, Lembur Diurus, Kota Ditata” didukung oleh 4 (empat) Misi dan 9 (Sembilan) Langkah (salapan langkah) untuk mewujudkan Visi Misi Jawa Barat. Istimewa adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur

berkeinginan/ berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa diantaranya Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Upaya yang akan dilakukan dalam mencapai Visi tersebut dijabarkan dalam 4 Misi, diantaranya :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan *clear governance*.

Terdapat 9 langkah untuk dapat mewujudkan Jabar Istimewa, diantaranya :

1. Langkah Kahiji

Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Ciang melalui 100% elektrifikasi listrik masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga

terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/ bebas buang air besar sembarangan);

2. Langkah Kedua

Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya;

3. Langkah Katilu

Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa persekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat;

4. Langkah Kaopat

Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;

5. Langkah Kalima

Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan penambahan layanan khusus, serta pemberian beasiswa dokter spesialis, sesuai dengan kelangkaan dan karakteristik penyakit masyarakat;

6. Langkah Kagenep

Penanganan stunting dan gizi buruk dengan meningkatkan peran kader PKK dan Pos KB Desa melalui penyediaan pangan bergizi dan bernutrisi tinggi di tingkat RT, serta

Pengembangan industri pengobatan berbasis kearifan lingkungan;

7. Langkah Katujuh

Mengembalikan kondisi lingkungan Jawa Barat melalui reboisasi hutan dan lahan, penyelamatan sumber mata air, normalisasi sungai dan muara, memperbaiki dampak abrasi, serta pengembangan kampung adat berbasis hutan, berbasis daerah aliran sungai, berbasis kampung nelayan, dan kampung adat berbasis lingkungan perkotaan;

8. Langkah Kadalapan

Pengembangan pengelolaan sampah mandiri sampai dengan tingkat RT serta pembentukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);

9. Langkah Kasalapan

Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, perangkat desa, RW, RT, Linmas, Kader PKK, Kader Posyandu, guru agama, guru ngaji, serta Penguatan pembangunan desa berbasis kearifan lingkungan dan transformasi birokrasi berdampak.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKPD mendukung Misi 4 (empat) Jawa Barat yaitu “Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance* serta mendukung langkah kasalapan yaitu Birokrasi Melayani Masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah langkah-langkah atau tindakan konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut. Visi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yaitu **“Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil dan Makmur”**, untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan 5 misi . BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan

keuangan mendukung misi ke-5 (lima) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, dan Akuntabel**. Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sedangkan untuk tujuan daerahnya yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik serta sasarannya yaitu Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas dengan Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General). Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan visi dan misi adalah **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan indikator sasaran:
 - Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif dengan indikator sasaran:
 - Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- Persentase pertumbuhan PAD

Permasalahan besar yang dihadapi Kabupaten Tasikmalaya dibagi didalam 4 (empat) aspek diantaranya, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Daya Saing, Aspek Kesejahteraan Masyarakat serta Aspek Pelayanan Umum. Dikarenakan BPKPD merupakan Perangkat Daerah penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah maka secara langsung harus dapat membantu dalam memecahkan permasalahan pada aspek pelayanan umum. Terdapat 9 (sembilan) isu besar pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan rancangan awal RPJMD 2025-2029, diantaranya :

1. Peningkatan infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Penanganan masalah sosial dan kemiskinan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana;
5. Percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal yang didukung sektor digital;
6. Peningkatan nilai tambah sektor potensial;
7. Penciptaan iklim investasi untuk mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
8. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya untuk dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja beserta targetnya. Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target Tahun 2026 :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1	Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi dan Sosial didukung Infrastruktur yang andal	Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Indeksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2				Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan PAD

Sumber : Renstra BPKPD tahun 2025-2029

Tabel 3.2
Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja PD Tahun 2026
1	Meningkatnya tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	85

Sumber : Renstra BPKPD tahun 2025-2029

Tabel 3.3
Sasaran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Indikator Sasaran PD Tahun 2026
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Indeksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,75
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan PAD	4%

Sumber : Renstra BPKPD tahun 2025-2029

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	IKU	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Indeksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,75
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan PAD	4%

Sumber : *Renstra BPKPD tahun 2025-2029*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah serta pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan untuk kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKPD tidak hanya mendukung pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saja, namun harus sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tujuan BPKPD sejalan dengan tujuan SDG's khususnya pada tujuan nomor 16 dan 17. Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*peace*) untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif akuntabel dan inklusif di semua level serta tujuan 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, usulan program kegiatan dan sub kegiatan juga harus mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya. Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati Tasikmalaya. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya memiliki fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah namun juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD yaitu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2026 BPKPD

direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 65 Sub Kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp757.397.753.915,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp700.883.852.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp24.386.888.765,00. Berikut rekapitulasi sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2026

<i>No</i>	<i>Sasaran PD</i>	<i>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</i>
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
I		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
4		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
5		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
6		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
7		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
8		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4		Pengamanan Barang Milik Daerah
5		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
IV		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

No	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
7		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
8		Penagihan Pajak Daerah
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sumber : BPKPD, diolah

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2026

Kode					Prioritas Pembangunan	Rancangan Awal RKPD		Keterangan
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
					Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		757.397.753.915	
5	2	1	2.01		Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.836.548.162	
5	2	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.000.000	
5	2	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.000.000	
5	2	1	2.01	7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	
5	2	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.126.913.147	
5	2	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.126.913.147,00	
5	2	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	482.419.485	
5	2	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.419.485	
5	2	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	395.000.000	
5	2	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.488.801.047	
5	2	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi	40.750.000,00	

Kode					Prioritas Pembangunan	Rancangan Awal RKPD		Keterangan
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	1		2	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	575.043.350	
5	2	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.915.967	
5	2	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	
5	2	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	550.000.000	
5	2	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.000.000	
5	2	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000.000	
5	2	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.532.730	
5	2	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	82.559.000	
5	2	1	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	
5	2	1	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	424.801.200	
5	2	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	424.801.200	
5	2	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.838.950.000	
5	2	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.099.750.000	
5	2	1	2.08	3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000	
5	2	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.200.000	
5	2	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.271.663.283	
5	2	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.990.000	
5	2	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.748.483	
5	2	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.188.924.800	
5	2	2				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	705.318.092.003	
5	2	2	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.662.640.000	
5	2	2	2.01	1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	85.000.000	
5	2	2	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	85.000.000	
5	2	2	2.01	3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	80.000.000	
5	2	2	2.01	4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.000.000	

Kode					Prioritas Pembangunan	Rancangan Awal RKPD		Keterangan
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.01	5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72.500.000	
5	2	2	2.01	6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.000.000	
5	2	2	2.01	7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	169.800.000	
5	2	2	2.01	8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	169.800.000	
5	2	2	2.01	9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	728.770.000	
5	2	2	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	647.394.000,00	
5	2	2	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	468.376.000	
5	2	2	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	718.500.000	
5	2	2	2.02	1		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60.500.000,00	
5	2	2	2.02	3		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	62.700.000	
5	2	2	2.02	5		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	233.200.000	
5	2	2	2.02	6		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	117.700.000	
5	2	2	2.02	9		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	244.400.000	
5	2	2	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.053.000.000	
5	2	2	2.03	2		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	180.000.000	
5	2	2	2.03	3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	128.000.000	
5	2	2	2.03	4		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	194.000.000	

Kode					Prioritas Pembangunan	Rancangan Awal RKPD		Keterangan
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	2	2.03	5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	152.000.000	
5	2	2	2.03	9		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	200.000.000	
5	2	2	2.03	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	79.000.000	
5	2	2	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000	
5	2	2	2.03	12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	60.000.000	
5	2	2	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	700.883.952.003	
5	2	2	2.04	8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	651.893.740.000	
5	2	2	2.04	9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.015.440.000	
5	2	2	2.04	10		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.974.772.003	
5	2	3				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.447.800.000	
5	2	3	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.447.800.000	
5	2	3	2.01	1		Penyusunan Standar Harga	140.000.000	
5	2	3	2.01	3		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60.000.000	
5	2	3	2.01	4		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	169.000.000	
5	2	3	2.01	7		Pengamanan Barang Milik Daerah	1.250.100.000	
5	2	3	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.418.700.000	
5	2	3	2.01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	410.000.000	
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.795.313.750	
5	2	4	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.795.313.750	
5	2	4	2.01	1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100.000.000	
5	2	4	2.01	2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	297.359.500	

Kode					Prioritas Pembangunan	Rancangan Awal RKPD		Keterangan
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	
5	2	4	2.01	3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	259.608.750	
5	2	4	2.01	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.463.000.000	
5	2	4	2.01	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.399.150.000	
5	2	4	2.01	9		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.549.083.500	
5	2	4	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	150.000.000	
5	2	4	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	1.000.000.000	
5	2	4	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	247.112.000	
5	2	4	2.01	15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	330.000.000	
					Jumlah		757.397.753.915	

Sumber : *BPKPD, diolah*

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Tasikmalaya

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab		
					Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									Tolok Ukur
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya													757.397.753.915							753.857.084.814	
5	2	1	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah - Nilai IKM Perangkat Daerah			Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	- 84 Poin - 87,25			39.836.548.162			Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	- 84 Poin - 87,25	38.836.554.467			
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			101 Dokumen	203.000.000			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101 Dokumen	203.000.000			
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		28 Dokumen		123.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	123.000.000	Sekretariat		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		73 Laporan		80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73 Laporan	80.000.000	Sekretariat		

Kode					Rancangan Awal RPKD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Laporan Pertanggungja waban Keuangan yang Sesuai Aturan	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	32.126.913.147			Persentase Laporan Pertanggungjawa ban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	32.126.913.147	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		97 Orang/ bulan		32.126.913.147,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ bulan	32.126.913.147	Sekretariat
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	482.419.485			Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	482.425.800	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Paket		87.419.485	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	87.425.800	Sekretariat
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		150 Orang		395.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150 Orang	395.000.000	Sekretariat
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	2.488.801.047			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	2.488.801.037	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Paket		40.750.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.750.000	Sekretariat

Kode						Rancangan Awal RKPD Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab
										Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		3 Paket		575.043.350	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	575.043.340	Sekretariat	
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Paket		60.915.967	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.915.967	Sekretariat	
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Paket		150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Sekretariat	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Paket		550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	550.000.000	Sekretariat	
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		4 Dokumen		62.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	62.000.000	Sekretariat	
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		4 Laporan		180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	180.000.000	Sekretariat	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		4 Laporan		737.532.730	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	737.532.730	Sekretariat	

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		82.559.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	82.559.000	Sekretariat
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	50.000.000	Sekretariat
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	424.801.200			Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100%	424.801.200	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		13 Unit		424.801.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	424.801.200	Sekretariat
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	1.838.950.000			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.838.950.000	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Laporan		1.099.750.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.099.750.000	Sekretariat

Kode					Rancangan Awal RPKD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan		88.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	88.000.000	Sekretariat
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Laporan		651.200.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	651.200.000	Sekretariat
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	2.271.663.283			Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.271.663.283	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		70 Unit		799.990.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	799.990.000	Sekretariat
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		143 Unit		282.748.483	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit	282.748.483	Sekretariat
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		3 Unit		1.188.924.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	188.924.800	Sekretariat

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah			Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya	100%			705.318.092.003			Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	705.524.642.003		
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	2.662.640.000			Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.662.640.000		
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		85.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		85.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	85.000.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		59 Dokumen		80.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		59 Dokumen		80.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	80.000.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		59 Dokumen		72.500.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	72.500.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		59 Dokumen		76.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen	76.000.000	Bidang Anggaran	

Kode						Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
										Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
											Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan		
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		169.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	169.800.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		169.800.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	169.800.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		5 Dokumen		728.770.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	728.770.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		647.394.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	647.394.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		398 Orang		468.376.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	468.376.000	Bidang Anggaran	
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	718.500.000			Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	713.050.000		

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		60.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	66.550.000	Bidang Perbendaharaan
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		236 Dokumen		62.700.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	65.000.000	Bidang Perbendaharaan
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		233.200.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	256.500.000	Bidang Perbendaharaan
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		117.700.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	125.000.000	Bidang Perbendaharaan

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		244.400.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	200.000.000	Bidang Perbendaharaan
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya			100%	1.053.000.000			Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.265.000.000	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		16 Dokumen		180.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	16 Dokumen	216.000.000	Bidang Akuntansi
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		17 Laporan		128.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	153.000.000	Bidang Akuntansi

Kode					Rancangan Awal RKPD Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		3 Laporan		194.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	235.000.000	Bidang Akuntansi
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		152.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	182.000.000	Bidang Akuntansi
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		200.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	240.000.000	Bidang Akuntansi
5	2	2	2.03	###	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		79.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	95.000.000	Bidang Akuntansi

Kode					Rancangan Awal RPKD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		118 Orang	60.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang	72.000.000	Bidang Akuntansi	
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		41 Lembaga	60.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	41 Lembaga	72.000.000	Bidang Akuntansi	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Tasikmalaya			100%	700.883.952.003		Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	700.883.952.003		
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Kabupaten Tasikmalaya		12 Laporan	651.893.740.000	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	651.893.740.000	Bidang Perbendaharaan	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan	30.015.440.000	Penerimaan Pembiayaan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	30.015.440.000	Bidang Perbendaharaan	
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota		Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan	18.974.772.003	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.974.772.003	Bidang Perbendaharaan	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan			Kabupaten Tasikmalaya	89%		3.447.800.000			Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89%	3.278.800.000		

Kode					Rancangan Awal RKPD	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Tasikmalaya						100%	3.447.800.000				
5		2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		140.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	140.000.000	Bidang Aset
5		2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		60.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	60.000.000	Bidang Aset
5		2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		169.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-	-	Bidang Aset
5		2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		2 Laporan		1.250.100.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.250.100.000	Bidang Aset
5		2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		1.418.700.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.418.700.000	Bidang Aset
5		2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Laporan		410.000.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	410.000.000	Bidang Aset

Kode					Rancangan Awal RKPD Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab
									Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		Kabupaten Tasikmalaya	100%			8.795.313.750			Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	6.217.088.344	
5	2	4	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya			100%	8.795.313.750			Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100%	6.217.088.344	
5	2	4	2.01	1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Dokumen		100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD
5	2	4	2.01	2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		2 Dokumen		297.359.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	297.359.844	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD
5	2	4	2.01	3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya		4 Laporan		259.608.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	168.109.500	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD
5	2	4	2.01	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		24 Unit		3.463.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24 Unit	2.113.000.000	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	2	4	2.01	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Tasikmalaya		2 Laporan		1.399.150.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	599.500.000	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD

Kode						Rancangan Awal RKPD Urusan /Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			Unit Penanggung Jawab
										Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
5	2	4	2.01	9		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Layanan		1.549.083.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1.212.007.000	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	2	4	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	150.000.000	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	2	4	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Kabupaten Tasikmalaya		12 Dokumen		1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.000.000.000	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
5	2	4	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		4 Dokumen		247.112.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	247.112.000	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD
5	2	4	2.01	15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Desa Sukaasih Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya		1 Laporan		330.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	330.000.000	Bidang Pengembangan dan Perencanaan PAD
Jumlah														757.397.753.915					753.857.084.814	

Sumber : BPKPD, diolah

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renja ini telah memperhatikan berbagai aspek strategis, baik internal maupun eksternal, serta mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah, regulasi nasional, dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu juga, Renja tersebut dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi BPKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga instrumen pengendali dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil.

Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2026 sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal seperti pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik, diharapkan berbagai tantangan dan isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat diatasi dengan tepat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan daerah, serta mampu mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik. Selain itu, dengan disusunnya Renja ini diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatakan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Singaparna, 25 Agustus 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Dr. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003